

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

##### 1. Darmastuti *et al.*, (2022)

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah yang berupa rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan, dan rasio kemandirian daerah terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2015-2019. Penelitian ini memiliki tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang diukur melalui skala rasio. Variabel tersebut adalah Rasio Efektivitas PAD (X1), Rasio Efisiensi Keuangan (X2), Rasio Kemandirian Daerah (X3), dan Alokasi Belanja Modal (Y). Sampel pada penelitian ini ditentukan melalui metode purposive sampling. Metode penentuan sampel ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel dengan cara menyeleksi sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriterianya yaitu sebagai berikut: 1. Merupakan kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur 2. Kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP untuk LKPD-nya pada periode 2015-2019

Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 23. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2015 hingga 2019 atau selama 5 tahun, hasil sebanyak 23 dikalikan 5 tahun sehingga didapatkan 115 sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmastuti et al., (2022) menunjukkan bahwa secara parsial ada dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal yaitu rasio efisiensi keuangan dan rasio kemandirian daerah, sedangkan variabel rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yakni kinerja keuangan berupa rasio keuangan dan variabel dependen yaitu alokasi belanja modal.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2015-2019 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022

## 2. Fajriati & Anwar (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah terhadap alokasi belanja modal serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Pada penelitian ini variabel yang digunakan variabel independen yakni rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah serta variabel dependen yaitu alokasi belanja modal. Sampel yang digunakan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajriati & Anwar (2022) menunjukkan bahwa pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan hasil uji masing-masing adalah 0.478 dan 0.395, serta kinerja keuangan berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0.498.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yakni kinerja

keuangan berupa rasio keuangan dan variabel dependen yaitu alokasi belanja modal.

- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2011-2020 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022

### **3. Yulientinah & Nur (2021)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Variabel Independen yaitu Kinerja Keuangan Daerah dengan pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Variabel Dependen yaitu Alokasi Belanja Modal Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bulukumba dengan mengambil laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) dan dimana datanya menggunakan data triwulan disetiap tahunnya dari tahun 2012-2019, untuk laporan keuangan 2020 sendiri belum dapat diakses public karena sedang dalam masa penyusunan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bulukumba itu sendiri dan belum diaudit. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji parsial (uji t), korelasi product moment, analisis regresi linear sederhana, dan "analisis koefisien determinasi" yang dimana setiap pengujiannya diuji dengan menggunakan alat bantu yaitu aplikasi SPSS versi 25.0 agar data yang dihasilkan lebih akurat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulientinah & Nur (2021) dengan pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial, kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independent yaitu kinerja keuangan berupa rasio keuangan dan variabel dependen yakni alokasi belanja modal.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Rasio keuangan pada variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah hanya menggunakan 1 (satu) rasio Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan 3 (tiga) rasio yakni

Derajat Desentralisasi Fiskal (X1), Efektivitas PAD (X2) dan Ketergantungan Keuangan Daerah (X3).

- b. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2012-2019 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022

#### **4. R. S. E. Putri & Munandar (2021)**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu analisa rasio seperti rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas serta efisiensi pendapatan asli daerah, rasio belanja langsung serta belanja tidak langsung, dan rasio . Sampel yang digunakan adalah LRA yang termuat dalam LKPD Pemerintah Daerah Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis rasio keuangan . Hasil penelitian yang dilakukan oleh R. S. E. Putri & Munandar (2021) menemukan bahwa derajat desentralisasi Kota Malang berada pada kriteria sedang dengan jumlah PAD masih relatif kecil, tingkat kemandirian Kota Malang terletak di bawah 50% atau dalam kategori kecil, tingkat ketergantungan Kota Malang terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, realisasi penerimaan PAD Kota Malang termasuk dalam kategori sangat efektif dengan disertai biaya pemerolehan PAD yang sangat efisien. Selain itu, perbandingan belanja langsung memperlihatkan rata-rata yang lebih besar sehingga tercermin bahwa

Pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan pendanaannya untuk kepentingan masyarakat.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yakni kinerja keuangan berupa rasio keuangan .

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan jenis penelitian pada peneliti sekarang ialah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.
- b. Pada peneliti terdahulu tidak menggunakan uji hipotesis Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan uji hipotesis.
- c. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2016-2020 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022

##### **5. Yanto & Astuti (2020)**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah; serta pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Variabel Independennya yaitu Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemampuan membayar kembali pinjaman, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Populasi penelitian seluruh Kabupaten dan Kota ya ada di Provinsi Jawa Tengah, yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Seluruh Kabupaten/Kota dijadikan sampel dalam penelitian ini, karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasikan suatu permasalahan tetapi menguji pengaruh antara variabel yang diteliti. Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan daerah tahun 2016 – 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (structural equation modeling), yang dioperasikan melalui program PLS (Partial Least square). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanto & Astuti (2020) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yaitu kinerja



keuangan berupa rasio keuangan serta variabel dependen yakni alokasi belanja modal.

- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pengujian hipotesis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan *Structural Equation Modelind* (SEM) dengan bantuan program *Partial Least Square* (PLS) sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis rasio dan analisis deskriptif dengan bantuan program SPSS.
- b. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2016-2018 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022

#### **6. Andriyani et al. (2020)**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi baik secara simultan maupun secara parsial yang dilihat dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen yang diwakili oleh Belanja Modal serta variabel independen diwakili oleh Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal,

Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Sampel yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2018 yaitu terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan E-Views versi 8.. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriyani et al. (2020) bahwa kinerja keuangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada tahun 2014- 2018 dan secara parsial rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal, rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal, rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yakni kinerja keuangan berupa rasio keuangan dan variabel dependen yaitu alokasi belanja modal.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Metode analisis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan E-Views 8 dan *Random Effect Model (REM)*, sedangkan peneliti sekarang analisis rasio dan analisis statistik dengan bantuan program SPSS.
- b. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2014-2018 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022

#### **7. M. Rizal Satria (2020)**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas terhadap alokasi belanja modal, mengetahui pengaruh rasio efisiensi terhadap alokasi belanja modal, dan mengetahui pengaruh rasio efektivitas dan rasio efisiensi terhadap alokasi belanja modal. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah X1 (Rasio Efektivitas), X2 (Rasio Efisiensi) dan Y (Alokasi Belanja Modal) . Sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran PSTNT BATAN Bandung periode 2012-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Korelasi Product Moment, Uji Korelasi Ganda, Uji Regresi Linear Ganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F) dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 20.0. Hasil penelitian yang dilakukan oleh M.Rizal Satria (2020) menunjukkan secara parsial, rasio efektivitas dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan secara simultan rasio efektivitas dan

rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di PSTNT BATAN Bandung.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yakni kinerja keuangan berupa rasio keuangan serta variabel dependen yaitu alokasi belanja modal.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Populasi penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pada PSTNT, sedangkan peneliti sekarang menggunakan pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi NTT
- b. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2012-2017 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022

### **8. R. S. Putri & Rahayu (2019)**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD serta belanja modal selain itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial antara derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen kinerja keuangan pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan derajat kontribusi BUMD dan variabel dependen yaitu alokasi belanja modal. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel dalam kurun waktu 4 tahun. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews 9.0. Hasil penelitian yang dilakukan oleh R. S. Putri & Rahayu (2019) menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Secara parsial, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yaitu kinerja keuangan berupa rasio keuangan dan variabel dependen yaitu alokasi belanja modal.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2014-2017 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022
- b. Teknik analisis yang digunakan peneliti terdahulu adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews 9.0 , sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan analisis rasio dan analisis statistik dengan bantuan program SPSS.

## **9. Indiyanti & Rahyuda (2018)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu kinerja keuangan daerah yang

diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, dan derajat kontribusi BUMD serta variabel dependennya yakni alokasi belanja modal. Sampel yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Bali terdiri dari delapan kabupaten dan satu pemerintahan kota periode tahun 2012-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yaitu kinerja keuangan berupa rasio keuangan dan variabel dependen yaitu alokasi belanja modal.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2012-2016 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022

#### **10. Arif & Arza (2018)**

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris dalam menjawab permasalahan penelitian di atas, yaitu: a. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal b. Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal c. Pengaruh Efisiensi Belanja Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. d. Pengaruh Keserasian Belanja terhadap Alokasi Belanja Modal. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah dan keserasian belanja, serta variabel dependennya yakni alokasi belanja modal. Sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 8. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif & Arza (2018) adalah Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017. 2. Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah



daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017. 3. Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017. 4. Keserasian Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independent yaitu kinerja keuangan berupa rasio keuangan serta variabel dependen yaitu alokasi belanja modal.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Data tahun penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2013-2016 Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 2020-2022

- b. Metode penelitian pada peneliti terdahulu merupakan penelitian kausatif (causative), sedangkan peneliti sekarang merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan asosiatif.
- c. Teknik analisis yang digunakan peneliti terdahulu adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews 8, sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan analisis rasio dan analisis statistik dengan bantuan program SPSS

Tabel 2. 1

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Tahun	Variabel Independen			Variabel Dependen
			RDDF	REPAD	RKKD	
1	Darmastuti <i>et al.</i>	2022	-	TB	-	Alokasi Belanja Modal
2	Fajriati & Anwar	2022	-	TB	-	
3	Yulientinah & Nur	2021	-	-	-	
4	R. S. E. Putri & Munandar	2021	B	B	-	
5	Yanto & Astuti	2020	B	B	B	
6	Andriyani <i>et al.</i>	2020	TB	TB	-	
7	M. Rizal Satria	2020	-	TB	-	
8	R. S. Putri & Rahayu	2019	B	B	-	
9	Indiyanti & Rahyuda	2018	B	B	-	
10	Arif & Arza	2018	-	TB	-	

Keterangan :

RDDF : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

REPAD : Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

RKKD : Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Agensi

Dalam penelitian ini peneliti memilih teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jansen & Meckling (1976) . Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Zelmianti (2016) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara prinsipal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Kontrak nyata antara agen dan prinsipal di pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Eksekutif (agen) membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif (principal) untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). APBD dapat digunakan principal (legislatif) untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (agen). Dalam hal ini, legislatif yang merupakan wakil dari publik dapat mengawasi dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Peranan masyarakat sebagai prinsipal dalam meningkatkan belanja modal adalah dengan memberikan sumber daya dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi yang menjadi sumber penerimaan utama bagi suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat yang dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah

daerah dalam memberikan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah, dimana sumber pembiayaan tersebut berasal dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya.

Selain pelayanan publik, pemerintah daerah (agen) wajib menyampaikan laporan kinerja khususnya di bidang keuangan. Besarnya kontribusi yang diberikan masyarakat (prinsipal) yang tercermin dalam PAD akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini merupakan unsur penting dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **2.2.2 Otonomi Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Secara definitif, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu *autos* bermakna sendiri dan *nomous* bermakna peraturan/hukum. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun (2014) tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, dapat diambil dua substansi penting pada otonomi daerah. Pertama, yaitu otonomi yang berimplikasi terhadap hak maupun wewenang bagi daerah untuk melakukan

manajerial terhadap kebijakan daerah. Kedua, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya.

Menurut Majid (2019) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, tujuan dari otonomi adalah :

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik;
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri;
3. Meringankan beban pemerintah pusat;
4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah;
5. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan di daerah;
6. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
8. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.

### **2.2.3 Keuangan Daerah**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 (2005), pengertian keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Menurut Elsy (2020) keuangan daerah adalah “hak dan kewajiban daerah yang dapat dihitung dan dinilai dengan uang, atau seluruh aset pemerintah daerah, baik aset tetap maupun aset tidak

tetap yang dikelola pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, yang dapat diukur dan dinilai dengan uang”

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 (2019) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Di samping itu, tujuan lain dari pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mendistribusikan sumber daya regional dan meningkatkan kesejahteraan.

Dari beberapa pengertian keuangan daerah diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu : (1) hak daerah, (2) kewajiban daerah dan (3) segala bentuk kekayaan baik barang maupun uang yang dapat dinilai yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Disamping memiliki unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalu melekat erat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disusun dan ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD sendiri merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

#### **2.2.4 Kinerja Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan kinerja adalah “keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur” (Yanto & Astuti, 2020) menarik kesimpulan berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut : “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang – undangan dalam periode anggaran”.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Indikator kinerja keuangan daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (*Inputs*)

Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya, jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang dibutuhkan, dan jumlah waktu yang dibutuhkan.

2. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya, ketaatan pada peraturan perundang – undangan dan rata – rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya, jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.

4. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya, tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.



## 6. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (*inputs*) program tetapi juga pada pengeluaran (*output*) dari program tersebut.

Menurut Mahsun (2006) dalam Andirfa (2018) mendefinisikan “pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam pencapaian tujuan”.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishent system*).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002) :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuat keputusan; serta
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu untuk mengatur upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Halim (2007) menyebutkan pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
4. Mengukur kontribusi masing – masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pada pemerintah daerah tahapan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara tertib dan komperhensif adalah :

1. Menyiapkan data – data anggaran dan laporan realisasi anggaran, yaitu data yang digunakan dalam analisis ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan realisasi APBD. Data anggaran memuat macam – macam penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam suatu periode.
2. Membandingkan data – data realisasi dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Item anggaran dibandingkan dengan item realisasi baik pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan akuntabel, laporan realisasi anggaran harus didukung dengan bukti – bukti yang cukup memadai.
3. Menghitung selisih dari anggaran. Perbandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan (*variance*). Selisih ini dikelompokkan menjadi dua yakni selisih penerimaan dan selisih pengeluaran sehingga dapat diketahui selisih lebih (surplus) atau selisih kurang (defisit) anggaran.
4. Menghitung persentase tingkat pencapaian anggaran. Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaiannya. Perhitungan persentase pencapaian dilakukan pada pos – pos penerimaan maupun pengeluaran.
5. Melakukan *analytical procedure* dengan membuat rasio – rasio keuangan. Untuk memperoleh gambaran komperhensif tentang kinerja organisasi, maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan perhitungan rasio – rasio anggaran,

seperti rasio efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah.

Analisis rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan kinerja perusahaan (Surastowo, 2019). Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada obyeknya (Pramono, 2014).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan perhitungan rasio – rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur – unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD antara lain (Patarai, 2018) :

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat;
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya;
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; dan
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi.

Pengukuran kepada keuangan menjadi kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam melihat seberapa berpengaruh atau seberapa besar kontribusi dari laporan keuangan terhadap keberlangsungan perusahaan, baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang,

Menurut Wardiyah (2017) rasio keuangan memiliki manfaat, yaitu:

- 1) Analisis kredit, analisis peringkat obligasi dan petugas pinjaman bank, menganalisis rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan membayar hutang-hutangnya.
- 2) Manager menerapkan rasio keuangan untuk membantu dalam menganalisis, meningkatkan serta mengendalikan operasi perusahaan.
- 3) Menganalisis rasio untuk dapat mengetahui efisiensi, resiko dan prospek dari pertumbuhan perusahaan.

Sedangkan menurut Fahmi (2018) manfaat yang dapat diambil dari menggunakan rasio keuangan, yaitu:

- 1) Bermanfaat untuk dijadikan alat dalam melihat prestasi dan kinerja perusahaan.
- 2) Bermanfaat sebagai rujukan untuk membuat suatu perencanaan.

- 3) Dapat dijadikan sebagai alat mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari segi keuangan.
- 4) Bermanfaat untuk kreditur, digunakan sebagai alat untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi serta dapat dikaitkan dengan jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- 5) Dapat dijadikan sebagai alat penilaian bagi stakeholder.

Dalam organisasi pemerintah untuk menilai dan mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain dengan melakukan analisis terhadap beberapa rasio antara lain : rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Berikut adalah penjelasan dari rasio – rasio tersebut.

#### 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai alat ukur untuk mencapai salah satu tujuan negara seperti memberikan pelayanan publik yang baik dan sebagai alat pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Oktavianti & Idayati, 2020). Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Marlianita & Saleh (2020) rasio derajat desentralisasi merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang diukur dengan membandingkan antara PAD dengan total Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Sularso & Restianto, 2011). Derajat desentralisasi dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Angka yang diperoleh dari hasil analisis dapat bervariasi. Sehingga diperlukan penilaian untuk mengetahui kriteria derajat desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991) dalam Waoma (2018) kriteria penilaian derajat desentralisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**

**Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal**

<b>Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah</b>	<b>Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal</b>
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

*Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991) dalam Waoma (2018 : 29)*

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif, jika rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi, rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah (Halim, 2007) .

Rasio efektivitas PAD merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memobilisasi penerimaan PAD yang ditargetkan. Dalam rasio tersebut akan diperoleh perbandingan antara PAD yang telah ditargetkan dengan PAD yang terealisasi. Rasio ini dihitung menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Angka yang diperoleh dari hasil analisis dapat bervariasi. Sehingga diperlukan penilaian untuk mengetahui tingkat efektivitas PAD. Secara umum nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 3**

**Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

<b>Persentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991) dalam Susanto (2019 : 83)

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah



Menurut Mahmudi (2015), Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Untuk menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Angka yang diperoleh dari hasil analisis dapat bervariasi. Sehingga diperlukan penilaian untuk mengetahui kriteria ketergantungan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991) dalam Waoma (2018) kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah dapat di kelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 2. 4**

**Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Rasio Keuangan Daerah</b>	<b>Ketergantungan</b>
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991) dalam Waoma (2018 : 29)

### 2.2.5 Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 (Tahun 2019 Pasal 55) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin (Sularso & Restianto, 2011).

Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat (Nalsasl & Hanifiyah, 2015). Dalam mengelola belanja modal, pemerintah harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah. Alokasi belanja modal merupakan anggaran untuk memperoleh aset tetap lainnya yang memiliki masa manfaat dua belas bulan (Indiyanti & Rahyuda, 2018 : 4726) . Alokasi belanja modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset dan menambah kekayaan daerah yang memberikan manfaat atau memperpanjang umur manfaatnya lebih dari satu periode dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 12 (Tahun 2019 pasal 65) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal dirincikan sebagai berikut :

1. Belanja Tanah

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kator, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Bangunan dan Gedung

Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 6. Belanja Aset Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset tetap lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja modal adalah suatu bagian dari belanja daerah dimana dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Jenis – jenis belanja modal serta komponen – komponen belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 2. 5**

**Jenis dan Komponen – Komponen Belanja Modal**

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen – Komponen Yang Dimungkinkan di Dalam Belanja Modal</b>
Belanja Modal Tanah	1. Belanja Modal Pembebasan Tanah 2. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 3. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4. Belanja Modal Pengurangan dan Pematangan Tanah 5. Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6. Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen – Komponen Yang Dimungkinkan di Dalam Belanja Modal</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan</li> <li>2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan</li> <li>3. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan</li> <li>4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan</li> <li>5. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan</li> <li>6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan</li> <li>7. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan</li> </ol>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin</li> <li>2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin</li> <li>3. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin</li> <li>4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin</li> <li>5. Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin</li> <li>6. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin</li> <li>7. Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin</li> </ol>
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan</li> <li>2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan</li> <li>3. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan</li> <li>4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan</li> <li>5. Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan</li> <li>6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan</li> </ol>

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen – Komponen Yang Dimungkinkan di Dalam Belanja Modal</b>
	7. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan 8. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	1. Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya 4. Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya 5. Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

*Sumber : Syaiful (2006) dalam Andirfa (2018 : 20 – 21)*

Sebagaimana dalam Permendagri Nomor 77 (Tahun 2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset tetap lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan”.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan persyaratan utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas

anggaran dan pelayanan publik yang memberikan *multiplier effect* (efek jangka panjang) secara finansial.

### **2.3 Kerangka Penelitian**

Otonomi daerah menurut Undang - Undang No 23 (Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi logis diberlakukannya otonomi daerah adalah menyebabkan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal maka kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sehingga sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari – hari maupun memberi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan sebuah kontrak antara prinsipal dengan agen, yang dilihat dengan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharuskan untuk mengelola keuangannya sendiri. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Sehingga dengan adanya desentralisasi dalam keuangan daerah diharapkan daerah bisa mandiri ketika mengelola keuangan

daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula. Kinerja keuangan akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

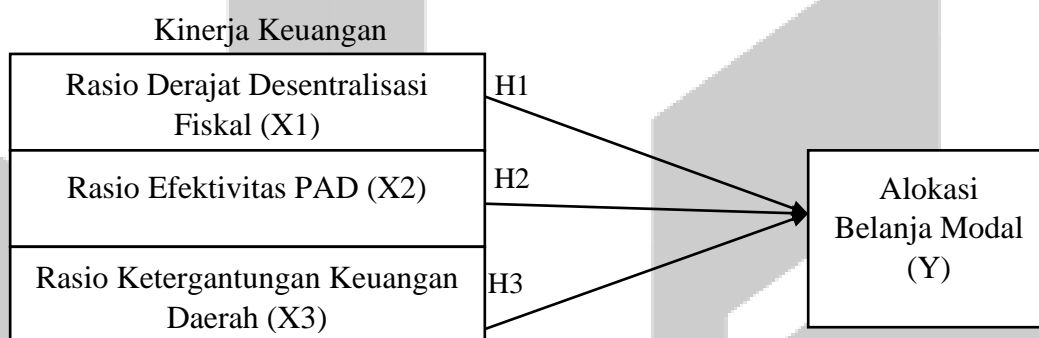
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu cara untuk menginformasikan apakah pemerintah telah berhasil mengelola keuangan daerahnya. Pengukuran kinerja menggunakan indikator keuangan berupa analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdapat tiga macam rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah.

Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Meningkatnya kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Apabila rasio ini mengalami peningkatan berarti kinerja keuangan semakin baik, sehingga pengalokasian terhadap Belanja Modal daerah mengalami peningkatan (Indiyanti & Rahyuda, 2018)

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.



Berdasarkan perumusan masalah dan eksplorasi tinjauan pustaka yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti membuat kerangka koseptual untuk mempermudah hubungan antar variabel dan alur penelitian dengan model sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini menguji adanya pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah secara parsial dan simultan terhadap Alokasi Belanja Modal.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Kinerja Keuangan Berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal

Derajat desentralisasi fiskal atau yang disebut dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Desentralisasi membuat pemerintah daerah lebih kompeten dalam pengelolaan urusannya sendiri. Secara umum perubahan kewenangan pembelanjaan maupun penerimaan anggaran, merupakan akibat

pelaksanaan desentralisasi fiskal yang menyebabkan pendelegasian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai wewenang lebih luas untuk mengelola keuangan daerahnya dengan adanya desentralisasi fiskal, sehingga alokasi belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat ditingkatkan (Indiyanti & Rahyuda, 2018).

Apabila rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan berarti kinerja keuangan daerah semakin baik, sehingga pengalokasian terhadap belanja modal daerah mengalami peningkatan. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima, didukung dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan alokasi belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat. Peningkatan alokasi belanja modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Hal tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018 : 4736), Marlina & dkk (2017), Yanto & Astuti (2020 : 355) serta Oktavianti & Idayanti (2020 : 17) menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan kajian teori dan empiris tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

## **2.4.2 Pengaruh Kinerja Keuangan Berupa Rasio Efektivitas PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Rasio efektivitas PAD menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan berdasarkan berdasarkan potensi rill daerah. Pencapaian PAD yang lebih besar dari targetnya, seharusnya dapat meningkatkan pengalokasian pada belanja modal (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Yanto & Astuti, 2020). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka semakin dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Arif & Arza, 2018 : 26) .

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sularso & Restianto (2011) serta Marlina & dkk (2017) menunjukkan efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan berupa efektivitas PAD maka akan menaikkan posisi alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan kajian teori dan empiris tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kinerja Keuangan berupa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

### **2.4.3 Pengaruh Kinerja Keuangan Berupa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Ketergantungan daerah merupakan rasio keuangan yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sularso & Restianto (2011) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. penelitian lain yang dilakukan oleh Marlina & dkk (2017) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Pengaruh positif dari rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan keuangan daerah maka akan meningkatkan alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kajian teori dan empiris tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kinerja Keuangan berupa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.